

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik *good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>2</sup> Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan akuntabel dan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil / manfaat kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

---

<sup>2</sup> Billy Pradana Suparno, Harsoyo, 'Penerapan Sakip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah', 6.2 (2021), 95–103.

Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan negara, termasuk mekanisme pelaksanaan anggaran, pembiayaan, pengeluaran, dan penggunaan anggaran negara<sup>3</sup>.

Sebagai bentuk merealisasikan tujuan dalam bernegara, penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk dapat mengelola keuangan yang diolah pada suatu sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, suatu instansi dalam lingkup pemerintahan harus dapat mengelola secara efektif dan juga efisien.<sup>4</sup> Namun jika dilihat menggunakan data yang ada saat ini, suatu instansi dalam lingkup pemerintahan belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Kuangan Negara dapat dikatakan sebagai instrumen atau alat yang sangat penting dalam proses implementasi pembangunan nasional yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara

<sup>4</sup> Yudi Nur Supriadi Anita Ardiyanti, 'Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Tangerang, Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten', *Jurnal Akuntansi Menejerial*, 66.1 (2018), 1–20.

yang dapat dikatakan sebagai pilar utama dalam hal pembiayaan atas terwujudnya tujuan serta fungsi negara<sup>5</sup>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber anggaran instansi pemerintah daerah yang menunjang dalam proses pembangunan supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan *public service* (pelayanan publik) oleh instansi pemerintahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan publik di Indonesia nomor 25 tahun 2009 dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik<sup>6</sup>.

Anggaran merupakan suatu instrumen yang mempunyai peranan vital pada organisasi sektor publik. Pada anggaran (sektor) publik harus ada peran serta partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan anggaran supaya terserapnya aspirasi serta kebutuhan yang dibutuhkan publik, sehingga segala kebutuhan publik dapat terakomodasi dalam anggaran.

Anggaran mempunyai fungsi yaitu sebagai alat atau instrumen perencanaan serta instrumen pengendalian. Anggaran sebagai instrumen perencanaan menunjukkan suatu tujuan yang harus diraih oleh pemerintah,

---

<sup>5</sup> Dini Nurdiani, 'Analisis Integrasi Dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19', *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2021), 18 <<https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1643>>.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

sedangkan fungsi anggaran sebagai instrumen pengendalian menandakan alokasi sumber anggaran atau dana publik yang disepakati oleh pihak legislatif agar dibelanjakan. Sumber-sumber penerimaan pemerintah yang dibatasi mengharuskan instansi atau pemerintah untuk merencanakan dan menyusun prioritas program/kegiatan dan pengalokasian anggaran supaya berjalan dengan efektif serta efisien. Apabila dalam proses perencanaan anggaran sangat lemah, hal itu dapat menyebabkan *underfinancing* dan *overfinancing* yang sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Pemanfaatan dan pengelolaan anggaran dari pemerintah dapat dijelaskan pada firman Allah SWT pada QS. Al-Furqon ayat 67, yang bunyinya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar” (As. Al-Furqon:67)<sup>7</sup>

Surah Al-Furqon ayat 67 mengajarkan umat Muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta mereka. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dari pemerintah daerah diharuskan digunakan sesuai dengan semestinya untuk mencukupi kebutuhan suatu dinas atau badan untuk membantu negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (2019), hal. 520

Sesuai dengan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu azas tahunan yaitu dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember<sup>8</sup>. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Selain itu, tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu komponen dalam struktur APBN kita adalah belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dengan salah satu penekanannya melalui kebijakan belanja pemerintah.

Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya,

---

<sup>8</sup> Mieke Rayu Raba, 'Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut Uu No. 15 Tahun 2006', Vi.3 (2017), 2-4.

pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi, perekonomian akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Ini berarti terdapat relevansi atau hubungan antara tingkat belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Peningkatan belanja modal dan barang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan penyerapan anggaran yang proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga tidak mengakibatkan hilangnya manfaat dari belanja itu sendiri karena tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, semakin cepat kegiatan terealisasi, tentu akan semakin besar manfaat dan efek stimulus yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi rendah di awal tahun, ternyata konsumsi pemerintah juga rendah. Pelaksanaan kegiatan tertunda hingga ke akhir tahun sehingga manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat tertunda dalam menerima manfaat atau dengan kata lain penyerapan anggaran yang tidak proporsional menyebabkan multiplier effect dari kebijakan fiskal pemerintah menjadi kurang optimal.

Berdasarkan kriteria penyerapan anggaran yang merupakan salah satu kriteria dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)<sup>9</sup> satuan kerja pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, ditetapkan target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III atau akhir September adalah: Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, Belanja Modal 70% dan Belanja Bantuan Sosial 75%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Jombang merupakan salah satu organisasi yang bertujuan menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. Badan ini didirikan dengan prinsip mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana strategis program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pengendalian. Serta bertugas untuk membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPMTSP Kabupaten Jombang juga target capaian kinerja guna mengetahui perbandingan realisasi kinerja terhadap anggaran yang ada untuk mengelola pendapatan yang dihasilkannya. Berikut merupakan data pencapaian kinerja yang di peroleh

---

<sup>9</sup> Kantor pelayanan pembendaharaan Negara Luwuk, "Optimalisasi Penyerapan Anggaran Untuk Akhir Tahun Yang lebih baik! ", 2022

DPMPTSP Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 2019-2023 untuk membantu menjalankan wewenang dan kebijakan :

Tabel 1.1

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kab.Jombang Thn 2019-2023

<b>Pencapaian Kinerja</b>	<b>Target</b>
2019	Rp 4.282.676.000
2020	Rp 1.992.384.730
2021	Rp 8.999.493.527
2022	Rp 7.526.234.788
2023	Rp 9.802.239.321
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 32.603.028.365</b>

*Sumber: Data capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jombang, 2023<sup>10</sup>*

Data diatas menunjukkan bahwa target pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Jombang terus mengalami perubahan dari tahun 2019-2023 ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan tersebut diantaranya, perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, penurunan aktivitas usaha maupun bencana alam maupun wabah. Pada tahun 2019 DPMPTSP kabupaten jombang memiliki target pencapaian kinerja sebesar Rp 4.282.676.000 Pada tahun 2020 target kinerja mengalami penurunan sebesar Rp 2.290.291.270 dari target pencapaian kinerja 2019 dikarenakan wabah COVID-19. Kemudian ditahun selanjutnya mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 7.007.108.797 dari target pencapaian kinerja 2020. Tahun 2022 target pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten jombang

---

<sup>10</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2023

Kembali mengalami penurunan sebesar Rp 1.473.258.739 dari target pencapaian kinerja 2021. Di tahun 2023 target pencapaian kinerja kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 802.745.794 dari tahun sebelumnya.

Menurut Irfan Fahmi (2011), laporan pencapaian kinerja keuangan adalah sesuatu analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa lama perusahaan telah menggunakan kaidah pengelolaan keuangan dengan baik dan benar<sup>11</sup>. Dalam pencapaian target kinerja, DPMPTSP Kabupten Jombang harus mengontol dan memanfaatkan anggaran untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tindakan dan hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Dengan demikian hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan, serta pemahaman tentang optimalisasi penggunaan anggaran DPMPTSP Kabupaten Jombang.

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas maka peneliti berkeinginan mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan” **Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas**

---

<sup>11</sup> Rita Satria, ‘Analisis Laporan Keuangan Untuk Melihat Kinerja Perusahaan Pada PT. Darma Henwa Tbk.’, *Jurnal Sekuritas*, Vol 1.2 (2017), 89–102.

## **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian tentang perpajakan yang perlu dikaji lebih dalam lagi, berikut pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana tingkat penyerapan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana capaian kinerja organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana Implikasi penyerapan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah rincian tujuan dari adanya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengetahui implikasi penyerapan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

#### **4. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Penyerapan anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Jombang memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja organisasi. DPMPTSP kabupaten Jombang berusaha untuk melakukan optimalisasi terhadap kinerja dan anggaran yang ada supaya tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan dinas. Apabila target kinerja sesuai dengan target anggaran yang ada maka kinerja keuangan pada dinas penanaman modal kabupaten Jombang dapat mewujudkan rancangan program agar mencapai target yang telah disepakati untuk tahun yang sedang berjalan.

##### **2. Batasan Masalah**

Supaya penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang” ini tidak menyeleweng dari pembahasan dan maksud dari penelitian, maka peneliti menetapkan batasan penelitian sebagai yaitu, obyek penelitian oleh peneliti ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jombang. Dinas ini dijadikan tempat penelitian di karenakan dinas ini merupakan dinas perizinan yang jarang orang ketahui capaian kinerjanya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, realisasi kinerja yang jelas dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat bagaimana dana digunakan, meningkatkan akuntabilitas, juga memantau sektor atau program tertentu, mengevaluasi efektifitas kebijakan dan membuat perubahan yang diperlukan.
2. Secara praktis, tentunya peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
  - a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian dengan menggunakan Alokasi anggran ini bermanfaat untuk pihak akademisi khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk digunakan untuk penelitian dan analisis sehingga dapat membuka peluang untuk memahami dampak kebijakan keuangan pada tingkat sektor atau program tertentu, dan juga dapat digunakan untuk

mengembangkan teori atau kerangka konseptual baru dalam bidang ekonomi, kebijakan politik, atau ilmu sosial lainnya.

- b. Manfaat bagi institusi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang)

Penelitian yang diteliti oleh peneliti diharapkan memberikan informasi kepada instansi terkait pengoptimalan pencapaian realisasi kinerja dan anggaran.

- c. Manfaat pihak lain

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya adalah Peneliti selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama mampu mengembangkan penelitian ini dengan cakupan lebih luas lagi.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

Merupakan suatu teori yang memberikan pemaparan mengenai konsep-konsep judul penelitian, hal ini dilakukan untuk mengurangi salah penafsiran kata. Berikut adalah uraian – uraian dari judul penelitian “Optimalisasi Penyerapan Anggaran dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”:

a) Optimalisasi

Merupakan suatu proses untuk mencapai nilai optimal suatu fungsi yang diterapkan. Dalam sebuah organisasi optimalisasi digunakan untuk menghemat sumber daya yang ada dengan memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik mungkin.

b) Penyerapan

Penyerapan adalah suatu tindakan menggunakan berpartisipasi, mengadopsi, atau memanfaatkan produk, layanan, peluang dan lain-lain. Penyerapan adalah tindakan menggenggam dengan pikiran.

c) Anggaran

Merupakan suatu perencanaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu proyek departemen tertentu dengan berbagai target yang telah ditentukan dari adanya perencanaan keuangan yang telah ditentukan.

d) Pencapaian

Pencapaian adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Misalnya, ketika seseorang berhasil menyelesaikan suatu proyek besar, maka itu merupakan suatu pencapaian yang membutuhkan usaha dan tekad. Pencapaian merupakan suatu proses dan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

e) Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dipresentasikan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan

peranannya dalam perusahaan. Kinerja adalah prestasi atau pencapaian seseorang sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya.

f) Organisasi

Organisasi adalah Sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Organisasi juga dapat diartikan suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan.

2. Definisi Operasional

Merupakan teori yang memberikan pernyataan berdasarkan bagaimana konsep yang telah dibuat peneliti dapat terukur. Secara operasional penelitian ini dimaknai sebagai pengoptimalan penerimaan dan pengeluaran kas agar anggaran dari pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari enam sub bab, dimana sistematika ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Berikut adalah sistematikanya:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi secara rinci.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Pemaparan pada bab ini berisi kajian teori yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu dimana landasan teori tersebut mengenai kerangka teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, dan kerangka berpikir secara teoritis atau paradigmatic.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji dan menguraikan tentang isi data hasil dari penelitian terhadap objek penelitian dan informasi – informasi yang masih bisa digali lebih dalam lagi.

## BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan secara jelas tentang bahasan temuan dari hasil penelitian terhadap objek penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan penelitian terdahulu.

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari adanya penelitian yang dilengkapi dengan saran untuk beberapa pihak. Pada BAB ini berisi tentang rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti atas permasalahan yang ada pada tema skripsi yang diangkatnya.